



Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Terhadap Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Sumatera Utara

Putri Wulandari Nasution¹, Tria Wulandari², Nasirwan³, Suhandi⁴, Nurul Hasanah⁵
putrinassution@gmail.com¹, triaw9109@gmail.com², nasirwan@unimed.ac.id³, suhandise5@gmail.com⁴,
nurul.psiologi07@gmail.com⁵

^{1,2,3} Universitas Negeri Medan

⁴ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

⁵ STKIP Budidaya Binjai

Article Info

Article history:

Received Februari 12th, 2024

Revised Maret 22th, 2024

Accepted Maet 26th, 2024

Kata Kunci:

Sistem Akuntansi Pemerintahan
Basis Akrual

Laporan Keuangan

ABSTRAK

Penelitian ini mengevaluasi implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah di Sumatera Utara. Tujuan utama penerapan sistem ini adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keakuratan informasi keuangan. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan pemahaman aparatur pemerintah, infrastruktur teknologi yang belum optimal, serta resistensi terhadap perubahan dalam sistem pencatatan keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kajian literatur yang melibatkan analisis terhadap jurnal ilmiah, buku, serta laporan keuangan resmi pemerintah Sumatera Utara tahun 2023. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan berbagai upaya perbaikan, seperti pelatihan dan pengembangan sistem informasi keuangan, penerapan SAP berbasis akrual masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam aspek kompetensi sumber daya manusia dan kesiapan teknologi. Untuk mengoptimalkan efektivitas implementasi SAP berbasis akrual, diperlukan strategi yang mencakup peningkatan kapasitas pegawai, optimalisasi sistem informasi akuntansi, serta penguatan kebijakan dan regulasi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mengalami perbaikan yang signifikan, sehingga hal ini berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah di Sumatera Utara.

ABSTARCT

This study evaluates the implementation of the accrual-based Government Accounting System (SAP) in the preparation of local government financial statements in North Sumatra. The main objective of implementing this system is to improve transparency, accountability, and accuracy of financial information. However, in practice, there are still various obstacles, such as limited understanding of government apparatus, non-optimal technological infrastructure, and resistance to changes in the financial recording system. This research was conducted using a literature review method that involved analyzing scientific journals, books, and the official financial report of the North Sumatra government in 2023. The results showed that despite various improvement efforts, such as training and development of financial information systems, the implementation of accrual-based SAP still faces

major challenges, especially in the aspects of human resource competence and technological readiness. To optimize the effectiveness of accrual-based SAP implementation, a strategy is needed that includes increasing employee capacity, optimizing accounting information systems, and strengthening policies and regulations. With these steps, it is expected that the quality of local government financial reports will experience significant improvements, so that this will contribute to increasing public confidence in transparency and accountability in regional financial management in North Sumatra



© 2024 Para Penulis. Diterbitkan oleh Perkumpulan Konsultan Manajemen Pendidikan Indonesia (PKMPI). Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY-NC-SA
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Nama Penulis, Putri Wulandari Nasution
Affiliation Universitas Negeri Medan
Email : putrinassution@gmail.com

Latar Belakang

Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan instrumen fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan pemerintah. Dalam konteks desentralisasi fiskal, penerapan SAP menjadi sangat penting guna memastikan bahwa anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan secara efektif kepada masyarakat dan lembaga pengawas. Pemerintah Indonesia telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang mengharuskan setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan prinsip akrual.

Namun, dalam implementasinya, banyak pemerintah daerah, termasuk yang berada di Sumatera Utara, menghadapi tantangan dalam menerapkan SAP secara ideal. Tantangan tersebut mencakup aspek sumber daya manusia yang kurang memahami konsep akuntansi berbasis akrual, infrastruktur teknologi informasi yang belum mendukung pencatatan transaksi berbasis akrual secara efektif, serta rendahnya tingkat kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan. Faktor lain yang turut mempengaruhi keberhasilan penerapan SAP adalah budaya kerja di instansi pemerintah yang masih terbiasa dengan sistem pencatatan berbasis kas, sehingga adaptasi terhadap sistem baru memerlukan waktu dan upaya yang cukup besar.

Selain itu, dalam berbagai penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa pemahaman aparatur pemerintah terhadap SAP berbasis akrual masih terbatas, yang berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Banyak daerah yang masih mengalami kesalahan dalam penyajian laporan keuangan, terutama dalam aspek pengakuan pendapatan dan beban. Kurangnya pelatihan dan sosialisasi mengenai SAP berbasis akrual juga menjadi kendala yang signifikan dalam proses implementasi. Dalam beberapa kasus, ditemukan bahwa pemerintah daerah masih cenderung mengadopsi kebiasaan pencatatan berbasis kas, yang berakibat pada penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Di Sumatera Utara, beberapa pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan penerapan SAP dengan mengadakan pelatihan dan peningkatan sistem teknologi informasi. Namun, efektivitas kebijakan ini masih belum ideal, mengingat adanya keterbatasan anggaran serta kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam untuk menilai sejauh mana penerapan SAP di Sumatera Utara telah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta mengidentifikasi hambatan utama yang menghambat keberhasilan implementasi SAP di tingkat daerah.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi strategis yang dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas penerapan SAP berbasis akrual. Solusi tersebut tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga aspek kebijakan, regulasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Definisi Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah adalah suatu rangkaian proses yang meliputi identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi yang terjadi dalam lingkungan pemerintahan daerah, baik di tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi. Informasi yang dihasilkan dari proses ini digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, pemerintah pusat, DPRD, auditor, serta masyarakat, untuk mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan transparansi, dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Semua pihak tersebut berperan dalam sistem akuntansi keuangan daerah (Halim dan Kusufi, 2013).

Tujuan Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan The Conceptual Framework for General Financial Reporting by Public Sector Entities (IPSAS, 2015), laporan keuangan disusun dengan tujuan menyajikan informasi mengenai suatu entitas yang menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam mengevaluasi akuntabilitas serta mendukung pengambilan keputusan. Tujuan laporan keuangan ditentukan oleh kebutuhan informasi pengguna. Dalam konteks pemerintahan daerah, laporan keuangan memberikan data yang berguna bagi pemangku kepentingan untuk menilai pertanggungjawaban serta menetapkan keputusan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik.

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Menurut Mahmudi (2011), akuntansi berbasis akrual adalah metode pencatatan akuntansi yang umum digunakan dalam dunia bisnis. Sistem ini mencatat transaksi ketika hak dan kewajiban telah berpindah, tanpa bergantung pada arus masuk atau keluarnya kas. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 8, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual didefinisikan sebagai standar sistem yang mencatat pendapatan, biaya, aset, kewajiban, dan ekuitas pada laporan keuangan berdasarkan prinsip akrual. Sementara, dalam laporan pelaksanaan anggaran, pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan tetap menggunakan basis kas sebagaimana ditetapkan dalam APBN atau APBD. Pada laporan neraca berbasis akrual, aset, kewajiban, dan ekuitas diakui pada waktu transaksi terjadi, tanpa mempertimbangkan waktu penerimaan atau pembayaran kas.

SAP berbasis akrual diterapkan pada berbagai tingkat pemerintahan, baik pusat maupun daerah, serta pada satuan organisasi pemerintah yang diwajibkan membuat laporan keuangan mengikuti standar hukum yang berlaku. SAP ini tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan didukung oleh pedoman yang menjadi dasar Akuntansi Pemerintah, sebagaimana diatur didalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Peran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam melaporkan kinerja keuangan dan hasil kegiatan yang telah dilakukan untuk suatu periode pelaporan. Tujuan utama dari laporan keuangan daerah mencakup:

a) Akuntabilitas

Melaporkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang diamanahkan kepada Pemerintah Daerah secara berkala guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b) Manajemen

Memfasilitasi pengguna laporan keuangan dalam menilai pelaksanaan kegiatan selama periode pelaporan, sehingga mendukung perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian terhadap seluruh aset serta ekuitas dana Pemerintah Daerah demi kepentingan masyarakat.

c) Transparansi

Menyediakan laporan keuangan dengan keterbukaan informasi dan dapat diakses oleh masyarakat, sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah.

d) Keseimbangan Antargenerasi Memungkinkan pengguna laporan menilai apakah pendapatan daerah dalam periode tertentu cukup untuk membiayai pengeluaran, atau jika beban pengeluaran akan berpengaruh pada generasi mendatang.

Karakteristik Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan yang baik harus memenuhi karakteristik tertentu untuk memastikan kualitas dan keandalannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, antara lain: Ada empat ciri utama informasi laporan keuangan yang bermutu:

a) Relevan: Informasi harus berguna dan dapat menganalisis peristiwa masa lalu bisa mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memberikan wawasan yang membantu mengevaluasi kejadian sebelumnya, present, dan future (nilai prediktif), memperbaiki ekspektasi sebelumnya (nilai konfirmatif), serta tersedia tepat waktu bagi pengguna.

b) Andal: Informasi harus terbebas dari kesalahan material dan penyajian yang menyesatkan, menyajikan informasi secara jujur (netral), dan dapat dibuktikan kebenarannya.

c) Dapat dibandingkan: Agar bermanfaat bagi pengguna, informasi dalam laporan keuangan harus konsisten dan sebanding dengan laporan periode sebelumnya atau entitas lain..

d) Dapat dipahami: informasi tersebut harus disajikan secara jelas dan mudah dipahami oleh pengguna yang memiliki pengetahuan memadai tentang aktivitas dan lingkungan operasi entitas pelapor, serta memiliki kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan seksama.

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang bermutu, informasi yang disajikan harus relevan, andal, dapat seimbang, dan dapat dipahami dengan baik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam peraturan.

Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjadi dasar untuk penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan pemerintah. SAP didasarkan pada prinsip-prinsip seperti basis akuntansi, relevansi historis, Pelaksanaan, substansi lebih diutamakan daripada struktur resmi, siklus, ketetapan, penyampaian penuh, dan penyajian proporsional.

Bastian (2020) mendefinisikan SAP sebagai seperangkat aturan hukum yang bertujuan memaksimalkan efektifitas dan akurasi laporan keuangan pemerintah. Mahmudi (2019) menambahkan bahwa SAP adalah bertindak sebagai acuan dalam prinsip-prinsip akuntansi sektor publik yang digunakan untuk pengelolaan laporan keuangan pemerintah.

Penelitian oleh Samsiah et al. (2023) di Provinsi Riau menunjukkan bahwa implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berkontribusi besar dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Hasil ini mengindikasikan bahwasanya kepatuhan terhadap SAP dapat meningkatkan relevansi, keandalan, serta daya banding informasi keuangan yang dihasilkan. Oleh karena itu, penerapan SAP secara konsisten penting guna memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah memenuhi prosedur yang telah ditetapkan.

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan pengelolaan keuangan pemerintah daerah mencakup beberapa komponen yang diatur dalam Peraturan Perundangan No. 71 Tahun 2010, antara lain:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Menggambarkan ketaatan pemerintah daerah terhadap APBD dengan menunjukkan perolehan, alokasi, dan pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu periode.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menyajikan perbandingan dengan periode sebelumnya serta mencakup beberapa pos-pos berikut ini:

- a) Saldo Anggaran Lebih, pada awal periode
- b) Pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih
- c) Selisih Pembiayaan Anggaran pada tahun berjalan
- d) Penyesuaian Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya serta faktor lainnya.
- e) Saldo Anggaran Lebih, setelah penyesuaian

3. Neraca

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, Neraca merupakan sebuah laporan yang mencerminkan keadaan keuangan dari suatu institusi yang bertanggung jawab atas pelaporan terhadap aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu waktu tertentu.

4. Laporan Operasional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Operasional adalah dokumen keuangan yang menggambarkan elemen-elemen seperti Pendapatan-LO, beban, transfer, pos luar biasa, serta surplus/defisit.

5. Laporan Arus Kas

Menjelaskan sumber dana, alokasi, dan perubahan saldo kas serta setara kas sepanjang periode pembukuan

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan setidaknya elemen-elemen seperti saldo ekuitas pada awal periode, hasil surplus/defisit laporan operasional, koreksi kesalahan, ekuitas akhir periode.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Memberikan penjelasan tambahan untuk mendukung pemahaman laporan keuangan serta perbandingan dengan entitas lain

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode *literatur review* untuk mengevaluasi penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam laporan keuangan daerah. Teknik ini diterapkan dikarenakan kemampuannya dalam menganalisis pola temuan utama, serta celah penelitian yang relevan dengan topik yang dikaji. Proses tinjauan pustaka dilakukan dengan menghimpun dan mengevaluasi berbagai sumber akademik, termasuk artikel penelitian, buku referensi, serta laporan keuangan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023. Literatur dikumpulkan melalui berbagai sumber data akademik, meliputi Google Scholar dan Publish or Perish, yang menyediakan artikel yang telah melalui proses peer-review.

Literatur yang dipilih sesuai dengan relevansinya terhadap topik, metodologi penelitian, serta keterkaitannya dengan akuntansi pemerintahan, terutama dalam akuntansi akrual. Kajian literatur yang telah dipilih kemudian ditinjau secara komprehensif untuk mengevaluasi dampak penerapan sistem akuntansi akrual terhadap keakuratan laporan keuangan pemerintah daerah, dengan fokus pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan keakuratan data keuangan. Selanjutnya, kajian ini juga menganalisis berbagai tantangan dalam implementasi sistem tersebut di sektor publik, termasuk terbatasnya kapasitas sumber daya manusia, minimnya keahlian tenaga kerja, serta perkembangan teknologi yang belum optimal, serta hambatan dalam menghadapi perubahan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait efektivitas dan kinerja sistem akuntansi berbasis akrual serta usulan kebijakan yang dapat memperbaiki implementasinya di lingkungan pemerintah Sumatera Utara.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap beberapa pemerintah daerah di Sumatera Utara, ditemukan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menggunakan basis

akrual masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya pemahaman pegawai pemerintah daerah terhadap prinsip akrual, yang menyebabkan kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan. Banyak pegawai yang masih terbiasa dengan sistem pencatatan berbasis kas, sehingga mengalami kesulitan dalam mengadaptasi prinsip akrual yang memerlukan pencatatan transaksi berdasarkan periode terjadinya, bukan berdasarkan kas yang diterima atau dikeluarkan.

Selain itu, keterbatasan Keterbatasan tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam akuntansi pemerintahan turut menjadi kendala dalam penerapan SAP di Sumatera Utara. Banyak daerah yang masih kekurangan tenaga akuntansi yang memiliki keahlian khusus dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual. Kondisi ini berpengaruh terhadap mutu laporan keuangan yang disusun, di mana masih kerap terjadi kekeliruan dalam pencatatan pendapatan dan beban, serta ketidaksesuaian dalam penyajian aset dan liabilitas

Aspek lain yang menjadi kendala dalam penerapan SAP berbasis akrual di Sumatera Utara adalah infrastruktur teknologi informasi yang belum memadai. Beberapa daerah masih menggunakan sistem manual dalam pencatatan keuangan, yang tidak hanya meningkatkan risiko kesalahan pencatatan tetapi juga menghambat efisiensi dalam proses pelaporan keuangan. Pemerintah daerah yang telah mengadopsi sistem berbasis teknologi play on words masih menghadapi kendala dalam hal kompatibilitas sistem serta integrasi dengan sistem keuangan lainnya.

Meskipun demikian, beberapa daerah di Sumatera Utara telah menunjukkan kemajuan dalam penerapan SAP. Daerah-daerah ini telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemahaman aparaturnya pemerintah terhadap SAP berbasis akrual melalui pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan. Selain itu, ada juga daerah yang mulai mengimplementasikan sistem informasi keuangan berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan keuangan.

Sebagai langkah untuk meningkatkan penerapan SAP di Sumatera Utara, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah harus memperkuat kompetensi sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan serta sertifikasi di bidang akuntansi pemerintahan. Di samping itu, pengembangan infrastruktur teknologi informasi perlu ditingkatkan guna memastikan pencatatan dan pelaporan keuangan berlangsung lebih efektif dan tepat. Pemerintah pusat juga berperan krusial dalam menyediakan bimbingan teknis serta mendorong kebijakan yang mendukung penerapan SAP berbasis akrual.

Dengan mengatasi kendala-kendala yang ada, diharapkan penerapan SAP berbasis akrual di Sumatera Utara dapat beroperasi dengan optimal dan memberikan kontribusi yang lebih maksimal bagi transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Langkah-langkah perbaikan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pada laporan keuangan pemerintah daerah, akan tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan publik di Sumatera Utara

Dengan mengatasi kendala-kendala yang ada, diharapkan penerapan SAP berbasis akrual di Sumatera Utara dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Langkah-langkah perbaikan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan publik di Sumatera Utara

Kesimpulan

Penelitian mengenai penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual di sektor pemerintahan daerah Sumatera Utara mengungkapkan bahwa implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Banyak pemerintah daerah belum mampu menyusun laporan keuangan berbasis akrual dengan optimal. Tantangan utama dalam penerapan sistem ini meliputi keterbatasan pemahaman aparaturnya terhadap prinsip akrual, kurangnya tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam akuntansi pemerintahan, serta minimnya infrastruktur teknologi informasi yang mendukung. Tidak maksimalnya penerapan SAP berbasis akrual menyebabkan kesalahan dalam pencatatan pendapatan dan beban, serta ketidaktepatan dalam penyajian aset dan kewajiban. Akibatnya, kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih belum mencapai standar yang diharapkan.

Saran

Pemerintah daerah harus meningkatkan kapasitas aparatur di bidang akuntansi pemerintahan dengan mengadakan pelatihan dan sertifikasi, sehingga mereka dapat memahami serta mengimplementasikan sistem akuntansi berbasis akrual secara efektif. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi keuangan yang lebih modern dan terintegrasi perlu didorong guna memastikan pencatatan keuangan yang lebih tepat dan efisien.

Daftar Pustaka

- Anggraini, F. R., Anggraini, F. R., & Yunita, K. (2024). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran. *Jurnal Ekobistek*, 13(23), 113–119.
- Ardiansah, D. R., Kamela, H., Ekonomi, F., Terbuka, U., Selatan, T., & Keuangan, L. (2024). Penilaian pelaksanaan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota medan. *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Akuntansi*, 2(2), 1–5.
- Citra Permatasari, N. H. (2022). As-Syirkah : Islamic Economics & Finacial Journal. *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal*, 1(1), 39–56. <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v3i3.268>
- Dan, A., Sdm, K., Kualitas, T., Keuangan, L., Kasus, S., Lingkungan, D., Provinsi, H., & Utara, S. (2022). 2) 1)). *7(2)*, 59–66.
- Darma, Erlina, dkk. (2022). Dampak Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara. 78–84
- Fatimah, S., & Indrawati, L. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 2(3), 539–553. <https://doi.org/10.35313/ialj.v2i3.3924>
- Halim & kusufi. (2017). Modul Akuntansi Sektor Publik. In Universitas Mulawarman (Issue 25).
- Syahrijal Hidayat. (2021). Buku Ajar Akuntansi Pemerintah. Padang Sidempuan PT Inovasi Pratama Internasional
- Ikhsan, A., Setiana, E., Hidayat, S., Welly, Y., Medan, U. N., Willem, J., Pasar, I., Estate, V. M., Medan, K., Utara, S., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Agung, S. (2022). Determinant Of The Auditor Switching On. 8, 103–111.
- Januari, N. (2024). Analisis Prosedur Akuntansi Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Daffa Roghib Aqwa Naser Daulay Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang. 4(1).
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2021). Standar Akuntansi Pemerintahan. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 71, 160–173. <https://www.ksap.org/sap/wp-content/uploads/2021/07/Buku-SAP-2021-1.pdf>
- Nevi Costari, & Putri Ariella Belinda. (2021). Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Suatu Instansi Pemerintahan. *Jamanta : Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 1(1), 58–77. https://doi.org/10.36563/jamanta_unita.v1i1.421
- Pratama, E. A., Sinadela, S., & Gushendarto, G. (2024). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jambi). *ECOMA: Journal of Economics and Management*, 2(1), 45–57. <https://doi.org/10.55681/ecoma.v2i1.38>
- Putra, S. A., & Varina, R. J. (2021). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(2), 85–98. <https://doi.org/10.33701/jtprm.v1i2.2071>
- Putri, E. (2024). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Perindustrian , Perdagangan Energi Dan Sumber Daya. 4(2)
- Rahmayanti, E., Murni, & Azhari, D. (2016). Akuntansi Sektor Publik (1st ed.). Yayasan Drestanta Pelita Indonesia Anggota.

-
- Rinaldi, A. G., & Siska, E. Y. (2024). *Sistem Akuntansi Dan Pengelolaan Keuangan Di Sektor Publik* (1st ed.). PT. Samudra Solusi Profesional.
- Risnangsih. (2016). Implementasi Dan Kendala Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2).
<https://doi.org/10.26533/eksis.v11i2.49>
- Satrio, M. D., Yuhertiana, I., & Hamzah, A. (2016). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Kabupaten Jombang. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 18(1), 59–69.
<https://doi.org/10.9744/jak.18.1.59-70>
- Sinurat, M., Sukma, R., Putri, S., Sinaga, W., Widowati, A., Sumedang, K., Barat, J., Labuhanbatu, P. K., Bandar, U., Utara, S., Agung, U. D., Petisah, K. M., Medan, K., & Utara, S. (n.d.). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. 89–105
- Syahrijal Hidayat. (2021). *Buku Ajar Akuntansi Pemerintah*. Padang Sidempuan PT Inovasi Pratama Internasional
- Tingkat, P., Bank, K., Harga, T., Perusahaan, S., Z, M. R. H., Situmeang, C., & Siregar, J. (2012). ISSN : 1693 - 6760 Diterbitkan Oleh : 02.
- Widyastuti, R. N., & Wulandari, I. (n.d.). Pengaruh Kompetensi SDM , Implementasi Akuntansi Akrual , Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 5(2020), 5368–5375
- Yuniarti, M., Rumondang, T., & Siregar, S. (2017). Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Corporate Responsibility Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 – 2017 2 .
Landasan Teori Dan Pengembangan Hipotesis. 1..